

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan Geopark, namun masih ada kekurangan dalam pemetaan pemangku kepentingan yang spesifik dan terperinci dalam konteks Geopark Natuna. Pada penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek pengembangan geowisata dan strategi pengelolaan secara umum, tanpa memberikan analisis mendalam mengenai peran, tanggung jawab, dan juga interaksi antara pemangku kepentingan yang terlibat. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Geopark Natuna, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat tentang konsep geopark, juga belum sepenuhnya dieksplorasi dalam literatur yang ada. Penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif pemetaan pemangku kepentingan dan strategi pengelolaan yang efektif serta berkelanjutan di Geopark Natuna.

Geopark (Taman Bumi) merupakan wilayah geografis tunggal yang menyatu. Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan dengan luas tertentu secara berkelanjutan yang memadukan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*), dan budaya (*culturaldiversity*) (Muzhaffar, 2022). Dalam pengembangannya, konsep ini berpilar pada aspek konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan nilai ekonomi. Geopark ini merupakan sebuah konsep baru,

yang dikembangkan oleh kementerian pariwisata. Konsep geopark mengacu kepada pengembangan kawasan yang berdasarkan kepada aktivitas konservasi, edukasi, dan peningkatan (Mustajadli & Junriana, 2023).

Menurut (Yanuar et al., 2018) geopark adalah kawasan dengan keunikan geologi (*outstanding geology*) yang memiliki nilai arkeologi, ekologi, dan budaya dengan melibatkan masyarakat setempat untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan tersebut. Wilayah Natuna ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tanggal 29 November 2018 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia yang diberi nama “Geopark Natuna”. Dengan ditetapkannya wilayah Natuna sebagai Geopark Natuna maka sangat penting adanya pengelolaan, agar pengelolaan tersebut efektif maka akan sangat dibutuhkan juga peran pemangku kepentingan didalamnya.

Gambar 1. 1 Logo Geopark Natuna



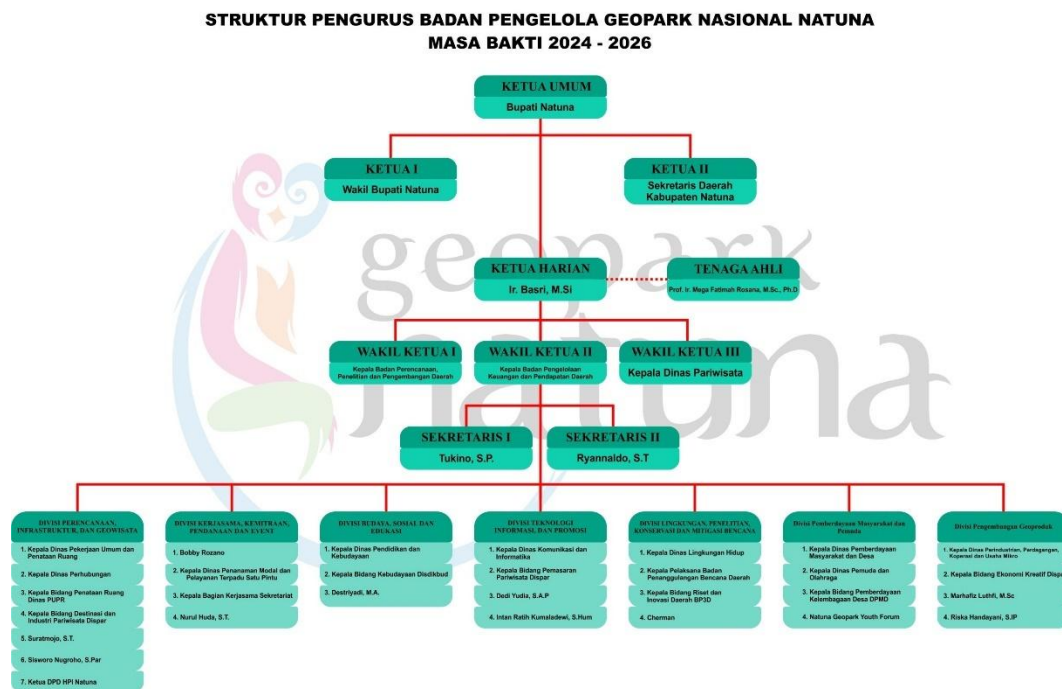
Sumber : (Logo Geopark Natuna, 2020)

Desain logo Geopark Natuna diatas berupa siluet hewan endemik Natuna yaitu “Kekah Natuna” atau disebut dalam bahasa latin “*Presbytis Natunae*”.

Hewan tersebut banyak dijumpai di Pulau Bunguran yang merupakan habitat aslinya. Logo Geopark Natuna terdiri dari perpaduan berbagai warna yang memiliki filosofi masing-masing. Akan tetapi secara keseluruhan makna filosofis dari Logo Geopark Natuna tersebut menggambarkan tentang keragaman geologi, biologi dan budaya yang dikembangkan dengan memperhatikan pelestariannya, mengedukasi tiap generasi serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (*Logo Geopark Natuna*, 2020).

Upaya memajukan pariwisata Kabupaten Natuna kedepan, Bupati Natuna telah membentuk tim kerja yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim ini yang dijadikan dalam satu wadah organisasi baru yaitu BPGN (Badan Pengelola Geopark Natuna). Pembentukan BPGN ini untuk mendukung wilayah Natuna yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Geopark Nasional berkembang dan juga menerapkan semangat kolaborasi dalam pembangunan yang berkelanjutan (Mustajadli & Junriana, 2023).

Gambar 1. 2 Struktur Pengurus BPGN Natuna Periode 2024-2026

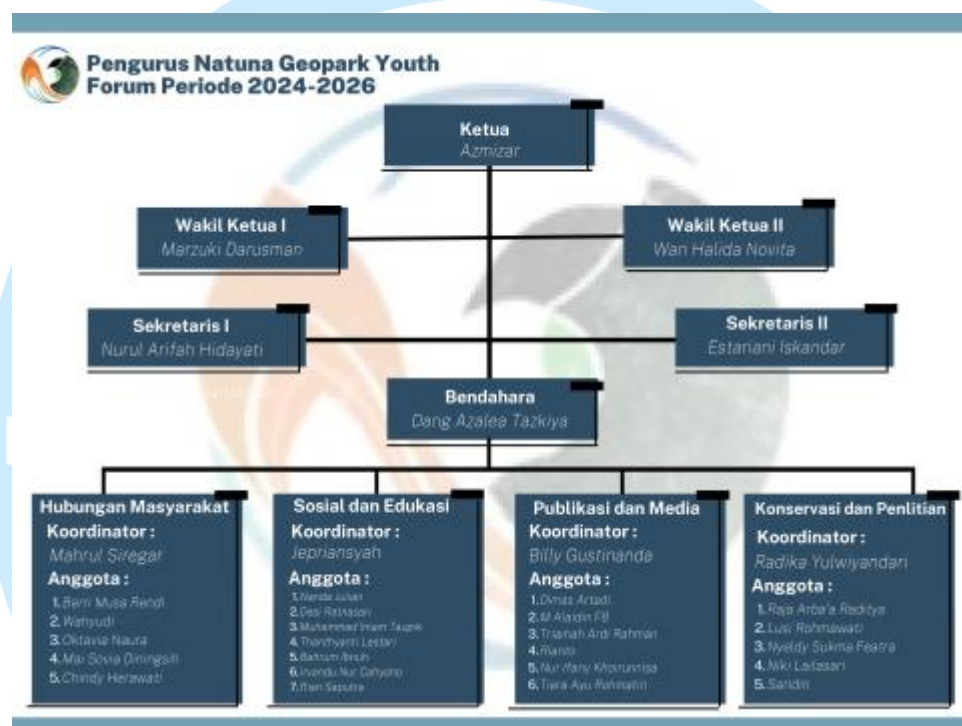


Sumber : (Profil Geopark Natuna, 2025.)

Dukungan terhadap program Geopark Nasional Natuna, terutama pada sektor pemberdayaan masyarakat pemuda, dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 15 tahun 2020 tentang RAN Pengembangan Geopark 2021-2025 dimana ada keterlibatan pemuda didalamnya, ketua BPGN Natuna membentuk Natuna Geopark Youth Forum (NGYF). Pembentukan kepengurusan secara resmi ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BPGN Natuna nomor 1 pada bulan April 2022 tentang Pengurus Natuna Geopark Youth Forum (NGYF). Natuna Geopark Youth Forum (NGYF) melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung BPGN dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Geopark Nasional Natuna (Mustajadli & Junriana, 2023). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada aspek pariwisata, tetapi juga mencakup

pendidikan, pelatihan, dan juga promosi kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian selain BPGN, NGYF diharapkan juga dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan Geopark Natuna serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Gambar 1. 3 Struktur Pengurus NGYF Periode 2024-2026



Sumber : (Profil Geopark Natuna, 2025.)

Pengelolaan suatu destinasi pariwisata menuntut adanya penguatan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif demi menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan tersebut (Eddyono, F., 2021). Pengelolaan Geopark Natuna sangat memerlukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) didalamnya agar bisa berkembang dan juga maju. Freeman & Phillips (2002)

memberikan definisi *stakeholder* secara sederhana dapat dipahami sebagai pihak yang dapat terpengaruh dan/atau mempengaruhi dalam sebuah keputusan. Jika dikaitkan dalam konteks kebijakan publik, maka pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak individu atau kelompok yang terpengaruh dan/atau mempengaruhi sebuah kebijakan publik (Sartika & Yogopriyatno, 2024). Dengan adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna itu sangat penting, mengingat keberagaman kepentingan dan perspektif yang ada. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, maupun sektor swasta, pengelolaan Geopark Natuna dapat dilakukan secara lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan, tetapi juga akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap keberadaan Geopark, sehingga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pengelolaan sangat membutuhkan proses pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*). Pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) dimaksudkan untuk mengetahui pihak yang terlibat serta bagaimana peran dan posisi pihak tersebut dalam penyusunan regulasi sampai dengan pelaksanaan dan pemantauan sehingga dapat mengevaluasi capaian dari pihak tersebut. Pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak secara langsung apabila terdapat regulasi yang tidak sesuai. Dalam buku (*World Bank Group*, 2022) manajemen destinasi yang sukses sangat bergantung pada

kolaborasi lintas sektor yang mampu mengintegrasikan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat guna menghasilkan dampak ekonomi yang inklusif bagi penduduk setempat. Sedangkan (Said, F., Haerul, & Farid, R. S., 2023) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di kawasan geopark sangat ditentukan oleh koordinasi yang efektif antar berbagai aktor kunci dalam menjalankan program pengembangan yang telah direncanakan secara terpadu. Selain itu (Adiansyah et al., 2024), pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) berfungsi untuk mengidentifikasi posisi peran dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) dari tingkat yang terendah sampai dengan tingkat yang tertinggi dengan menempatkan pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dengan peran yang kuat dan tidak memiliki peran serta pengaruh dan juga menempatkan pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai pembantu atau penunjang dari pengelolaan yang dalam hal ini pengelolaan Geopark Natuna (Adiansyah et al., 2024).

Teori stakeholder yang disampaikan oleh Freeman (1984) bahwa pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam teorinya ini menekankan pentingnya memahami kepentingan dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, yang mencakup tidak hanya pemilik atau manajemen, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam operasi organisasi. Teori ini mendorong organisasi untuk mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap

semua pemangku kepentingan, bukan hanya fokus pada keuntungan finansial. (Kurniansah, R., Dkk, 2024) mengatakan bahwa keberhasilan dalam pembangunan sebuah destinasi pariwisata sangat bergantung pada kemampuan pihak pengelola untuk mengintegrasikan peran dari setiap pemangku kepentingan guna memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola destinasi yang inovatif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan (Nasution, S., 2025). Maka dari itu, hubungan antara pemangku kepentingan dapat membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mengarah pada pengembangan teknik pemetaan dan analisis pemangku kepentingan yang dalam pengelolaan dan juga kebijakan publik (Sartika & Yogopriyatno, 2024).

Matriks kepentingan dan pengaruh yang dikembangkan oleh Johnson dan Scholes (1999) adalah alat analisis yang membagi pemangku kepentingan menjadi empat kategori berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh terhadap proyek. Kategori tersebut yakni pemangku kepentingan utama, yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi, sehingga memerlukan kerja sama yang erat. Pemangku kepentingan yang perlu diperhatikan, yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemangku kepentingan yang perlu diberikan informasi, memiliki kepentingan rendah tetapi pengaruh tinggi, sehingga harus tetap

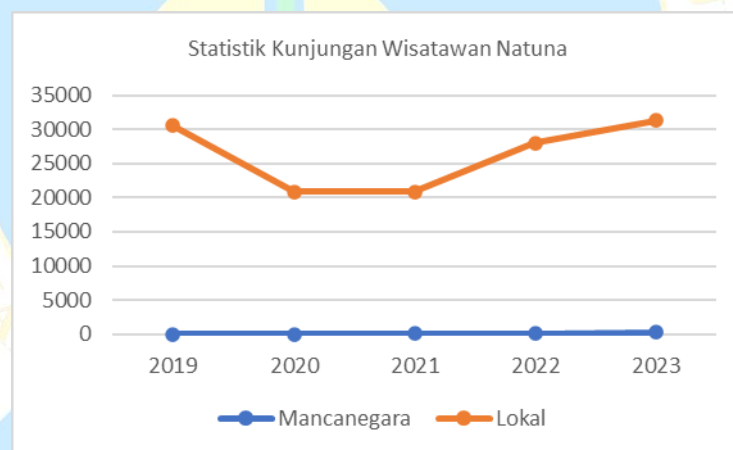
diinformasikan mengenai perkembangan proyek. Dan pemangku kepentingan yang tidak terlalu penting, yang memiliki kepentingan dan pengaruh rendah, sehingga perhatian terhadapnya dapat diminimalkan. Dengan menggunakan matriks ini, organisasi dapat merumuskan strategi komunikasi dan keterlibatan yang lebih efektif untuk setiap kelompok pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan proyek (Adiansyah et al., 2024).

Geopark Natuna memiliki luas wilayah sekitar 141.901,02 hektar, yang terdiri dari 13 kecamatan dan 75 desa/kelurahan, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 61.K/GL.01/MEM.G/2023 di Natuna terdapat 15 lokasi warisan geologi, 5 diantaranya (Pulau Senua, Gunung Ranai, Batu Kasah, Pulau Akar, dan Pulau Setanau) telah ditetapkan sebagai geosite (Ryannaldo & Intan Ratih, 2024). Wilayah ini memiliki keanekaragaman geologi yang tinggi, dengan formasi batuan yang berusia jutaan tahun, gua-gua karst yang indah, dan pantai-pantai yang eksotis.

Geopark Natuna juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, dengan berbagai jenis flora dan fauna endemik. Keberadaan spesies-spesies tersebut tidak hanya menambah nilai ekologis, tetapi juga memberikan potensi untuk penelitian dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat lokal di Geopark Natuna memiliki budaya yang khas, dengan tradisi maritim yang kuat dan kearifan lokal yang tinggi. Dalam hal ini Geopark Natuna memerlukan pengelolaan dengan peran-peran pemangku kepentingan didalamnya untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan, dengan

mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan keanekaragaman geologi dan hayati yang ada di Geopark Natuna (*Profil Geopark Natuna*, n.d.). Prinsip utama pariwisata berkelanjutan adalah kemampuannya dalam memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal (Rampai, 2023). Pariwisata berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga harus memastikan adanya distribusi manfaat sosio-ekonomi yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan guna menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal secara jangka panjang (Astuti, N. W. W., Dkk, 2024).

Gambar 1. 4 Data Statistik Kunjungan Wisatawan Natuna Pada 2019-2023



Sumber : (*Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna*, 2023.)

Pengelolaan Geopark Natuna masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah memiliki kepentingan dan peran yang berbeda-beda dalam pengelolaan geopark. Peran masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil merupakan pilar fundamental dalam membangun daya saing sebuah destinasi,

karena mereka mampu menghadirkan produk dan layanan yang memiliki nilai autentisitas serta keunikan khas daerah bagi para wisatawan (Susanty, S., Dkk, 2024). Selain itu, Geopark Natuna juga menghadapi keterbatasan sumber daya. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk mengelola geopark. Masyarakat lokal juga memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep geopark. Banyak masyarakat lokal yang belum memahami manfaat geopark bagi mereka (Mustajadli & Junriana, 2023). Hal ini dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan geopark, sehingga koordinasi antar pemangku kepentingan pun kurang dan dapat menimbulkan konflik serta menghambat pengelolaan geopark yang efektif (Ryannaldo & Intan Ratih, 2024) . Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai geopark, serta memperkuat koordinasi anantara semua pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mewujudkan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang sudah diperoleh, sehingga selaku rumus permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pemetaan, peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna?
2. Bagaimana model pengembangan Geopark yang ideal menurut pemangku kepentingan yang terhubung dengan Geopark Natuna?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna. Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Geopark Natuna, dan juga untuk memahami peran, kepentingan, dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas model pengembangan Geopark yang ideal menurut pemangku kepentingan yang terhubung dalam pengelolaan Geopark Natuna agar pengelolaannya efektif dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka paradigma berpikir dalam penelitian tentang pemetaan pemangku kepentingan selanjutnya. Penelitian dimasa mendatang diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait aspek pemetaan dalam pemangku kepentingan itu sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan pemikiran peneliti selanjutnya dan juga pembaca penelitian ini, dan menjadi referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian karya ilmiah serta sebagai bahan untuk proses perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam 5 bab. Pada bab 1 dalam penelitian ini menjelaskan fenomena masalah yang terjadi dan berkaitan dengan topik

penelitian ini yaitu tentang pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna. Di dalam bab 1 ini terdapat latar belakang yang disusun dari umum ke khusus. Pada bab ini peneliti juga menyajikan fakta dan artikel ilmiah terdahulu yang menjelaskan terkait topik penelitian yang akan peneliti lakukan, sehingga peneliti mengambil topik penelitian mengenai pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna di Kabupaten Natuna berdasarkan fakta dan sumber ilmiah terdahulu. Pada bab ini juga menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian dengan topik tersebut. Selain itu juga terdapat fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana pemetaan, peran dan tanggungjawab pemangku kepentingan yang berkaitan dalam pengelolaan Geopark Natuna dan juga bagaimana model pengembangan Geopark yang ideal bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Pada bab 2 terdapat kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang menjadi literatur review yang digunakan untuk menjadi penguatan penelitian dengan topik ini dilakukan. Didalam bab ini juga terdapat teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Stakeholder Mapping*. Pada bab 2 ini juga terdapat kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan juga terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut, sehingga pada bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada bab 3 berisi metode penelitian yang menjelaskan jenis dari penelitian ini. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena melalui

penelitian mendalam. Pada bab ini juga menjelaskan objek dan lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, informan atau narasumber untuk mendapatkan data penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Dijelaskan juga didalam bab ini mengenai triangulasi data yaitu agar data yang didapat asli dan dapat dipercaya, konsiderasi etik yang menjamin kerahasiaan data yang didapatkan. Diakhir bab ini juga terdapat jadwal penelitian yang menggambarkan waktu kegiatan penelitian dilaksanakan.

Bab 4 menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang artinya pada bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dari data yang telah dikumpulkan terkait pemetaan pemangku kepentingan yang berkaitan terhadap pengelolaan Geopark Natuna dan juga pembahasan jawaban dari rumusan masalah. Pada sub bab pertama di bab ini menjelaskan konteks historis mengenai Geopark Natuna pada Geosite Tapak Natuna dan juga Alif Stone. Dalam bab ini juga akan menjelaskan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di sekitar Geosite tersebut. Pada sub bab selanjutnya menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan Geopark Natuna dan juga lembaga-lembaga atau pemangku kepentingan apa saja yang ikut mengelola Geopark tersebut. Selanjutnya pada bab ini juga akan menjelaskan peran dan juga tanggung jawab pemangku kepentingan yang bersangkutan dalam pengelolaan Geopark Natuna dan juga Sumber daya apa saja yang berpengaruh dalam mengelola Geopark Natuna tersebut. Pada sub bab selanjutnya di dalam bab ini akan menjelaskan

model pengembangan yang ideal dalam pengelolaan Geopark Natuna tersebut. Pada bab ini akan diakhiri dengan pembahasan sesuai dengan teori dan juga penelitian terdahulu dari hasil wawancara dan juga observasi yang telah didapatkan peneliti.

Bab 5 dalam penelitian ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dideskripsikan dan juga disajikan. Kesimpulan ini ditulis dengan singkat dan mudah dipahami terkait dengan hasil penelitian dari topik penelitian yang diambil. Didalam penelitian ini juga terdapat implikasi teoritis yaitu dampak ataupun konsekuensi dari hasil penelitian terhadap teori atau konsep yang sesuai atau kontribusi penelitian terhadap teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada bab ini peneliti juga menyajikan saran atau harapan peneliti akan manfaat dari hasil penelitian ini.

